Jurnal Kajian Sosial Humaniora

Volume 1 Number 2 2024, pp 110-122
ISSN: 3064-0318 (Online)
DOI: https://doi.org/10.63082/jksh.v1i2.11
Received: October 1, 2024; Revised: December 30, 2024; Accepted: December 31, 2024

Politik Uang dan Preferensi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kota Padang Panjang

Reno Fernandes[1*], Rizki Herdi Kurniawan[2], Rio Putra Winanda[3]

[1]Universitas Negeri Padang [2,3]Revolt Institute
*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian antara karakter pemimpin yang diinginkan dan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Padang Panjang. Meskipun mayoritas responden menginginkan pemimpin yang jujur, anti-korupsi, dan religius, lebih dari separuh responden mengaku bahwa politik uang memengaruhi pilihan mereka. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional, teori ketidakpercayaan terhadap politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi untuk menganalisis fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah survei dengan 1200 responden yang dipilih secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dipandang sebagai keuntungan langsung yang lebih menarik dibandingkan janji politik yang tidak pasti. Temuan ini menunjukkan ketergantungan masyarakat pada politik uang meskipun mereka memiliki preferensi terhadap pemimpin yang ideal. Penelitian ini menyarankan perlunya pendidikan politik yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penguatan institusi pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Kata Kunci: Padang Panjang; Politik Uang; Pilkada.

Abstract

This study examines the discrepancy between the desired characteristics of leaders and voting behavior influenced by money politics in the local elections of Padang Panjang. While the majority of respondents prefer leaders who are honest, anti-corruption, and religious, more than half acknowledge that money politics influences their voting decisions. This research employs rational choice theory, political distrust theory, and socio-economic inequality to analyze the phenomenon. The method used is a survey with 1200 respondents selected proportionally. The findings show that money politics is seen as a more attractive immediate benefit compared to uncertain political promises. These results highlight the public's dependence on money politics despite their preference for ideal leaders. The study suggests the need for better political education, stronger law enforcement, and the reinforcement of electoral institutions to improve the quality of elections and restore public trust in the democratic system.

Keywords: Money politic; Padang Panjang; Pilkada.

How to Cite: Fernandes, R., Kurniawan, R.H. & Winanda, R. P. (2024). Politik Uang dan Preferensi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kota Padang Panjang. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (2), 110-122.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Politik uang telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi elektoral di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Hamson, 2021; Pahlevi & Amrurobbi, 2020; Prihatini, 2018). Dalam demokrasi ideal, pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan evaluasi rasional terhadap program kerja, rekam jejak, dan kepribadian kandidat. Pemilu seharusnya menjadi mekanisme bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang paling mampu merepresentasikan kepentingan mereka secara etis dan bertanggung jawab (Indrawan & et al, 2023). Namun, dalam konteks politik uang, pemilu sering kali berubah menjadi ajang transaksi ekonomi yang mengaburkan penilaian pemilih terhadap kualitas kandidat (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal ini didukung oleh temuan Abdiellah (2022) yang menunjukkan bahwa politik uang kerap digunakan sebagai alat pragmatis untuk membangun loyalitas pemilih dalam situasi di mana kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial tinggi.

Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak negatif pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Herman, 2022). Kandidat yang terpilih melalui mekanisme ini cenderung fokus pada pengembalian modal politik, melemahkan akuntabilitas, dan memperburuk budaya korupsi (Abdiellah et al., 2022). Selain itu, politik uang juga memperkuat siklus ketergantungan ekonomi dan politik di masyarakat, yang mengakibatkan pemilu lebih dipandang sebagai peluang mendapatkan keuntungan materi sesaat daripada sebagai mekanisme untuk perubahan struktural (Abou Ltaif & Mihai-Yiannaki, 2024). Dalam jangka panjang, fenomena ini menghambat kemunculan pemimpin yang berintegritas dan menciptakan hambatan serius terhadap perkembangan demokrasi deliberatif (Halida et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner untuk memahami akar permasalahan ini dan menyusun strategi mitigasi yang efektif, termasuk melalui penguatan pendidikan politik dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Politik uang telah menjadi fokus berbagai kajian di Indonesia dan negara-negara berkembang, karena dampaknya yang signifikan terhadap demokrasi. Aspinall (2019) mengkaji bahwa politik uang di Indonesia sering dipicu oleh sistem pemilu yang mahal dan ketergantungan kandidat pada jaringan patron-klien. Lebih lanjut penelitian Hicken (2022) Pemberian uang atau barang kepada pemilih dianggap sebagai bentuk *redistribusi informal* yang diterima sebagian masyarakat. Penelitian serupa di berbagai negara di asia tenggara yang dilakukan Tan (2020) menunjukkan bahwa politik uang juga dianggap sebagai strategi bertahan hidup oleh pemilih miskin. Selain itu, studi di negara-negara Afrika dan India menemukan bahwa politik uang

berkembang di lingkungan dengan pendidikan rendah dan lemahnya penegakan hukum, yang memungkinkan kandidat mendistribusikan uang tanpa pengawasan (Banerjee, 2020; Davies, 2021).

Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan masalah yang lebih luas di negara berkembang, terkait dengan tingkat literasi politik, transparansi, dan akuntabilitas. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan literasi politik, reformasi sistem pendanaan kampanye, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, implementasi solusi ini bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi, terutama di negara seperti Indonesia, di mana pengawasan institusi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terbatas (Haryanti & Pujilestari, 2019; Muharram et al., 2023).

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang pernah ada. Penelitian ini di fokuskan di Padang Panjang, sebuah daerah yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah karena masyarakatnya yang religius dan kental dengan nilai-nilai budaya Islam. Berdasarkan data survei, ditemukan bahwa kriteria pemimpin yang diinginkan masyarakat sangat ideal, yaitu taat beribadah (29,1%), jujur, dan anti korupsi (35,3%). Harapan ini mencerminkan aspirasi mereka terhadap kepemimpinan yang bermoral dan berintegritas tinggi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kontradiksi yang mencolok, di mana lebih dari separuh responden (53,3%) menyatakan bersedia mengubah pilihan politik jika menerima uang atau sembako. Fenomena ini menyoroti adanya celah antara nilai-nilai ideal yang dianut masyarakat dan praktik pragmatis dalam konteks politik uang.

Kontradiksi ini membuat kajian penelitian ini menarik dan relevan. Dengan latar belakang Padang Panjang sebagai kota yang merepresentasikan perpaduan antara religiusitas, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas perilaku pemilih di daerah tersebut tetapi juga menawarkan wawasan yang lebih luas tentang tantangan demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam penyebab kontradiksi ini dan memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi pengaruh politik uang, sehingga dapat mendorong proses demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menganalisis fenomena politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Padang Panjang. Penelitian dilakukan pada 1-7 November 2024 dengan

pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran objektif dan terukur mengenai preferensi pemilih serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam konteks politik uang. Sampel penelitian terdiri dari 1200 responden yang dipilih secara stratified random sampling dari pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan Margin of Error (ME) sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang mengukur karakteristik demografis responden, preferensi terhadap kriteria pemimpin ideal, serta sikap terhadap politik uang. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner online, dengan tujuan untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih. Menurut Creswell (2017), pendekatan kuantitatif dengan desain survei memungkinkan analisis objektif yang mencerminkan karakteristik dan preferensi pemilih secara terukur. Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan analisis faktor dan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan kualitas kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruh politik uang dalam Pilkada di Padang Panjang dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas pemilu di daerah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika preferensi pemilih dan fenomena politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang 2024. Berdasarkan data survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden dengan margin of error (ME) sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%, hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan menarik terkait karakteristik pemilih, preferensi politik, dan sikap terhadap praktik politik uang.

Karakteristik Pemilih

Dari segi demografi, distribusi usia pemilih menunjukkan bahwa kelompok usia 36-45 tahun dan 46-55 tahun mendominasi jumlah pemilih, masing-masing sebesar 21,8% dan 21,9%. Sementara itu, kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun juga memiliki proporsi signifikan, dengan 15,9% dan 17,1%, meskipun lebih rendah dibandingkan kelompok usia menengah. Kelompok usia 56-65 tahun dan 66 tahun ke atas tercatat sebagai kelompok yang lebih sedikit, dengan masing-masing 14,8% dan

8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih dengan rentang usia lebih dewasa memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan hasil Pilkada.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pemilih (54,2%) memiliki pendidikan tamat SMA atau sederajat, diikuti oleh pemilih yang tamat SMP atau sederajat (16,4%) dan yang tamat SD atau sederajat (8,2%). Sementara itu, pemilih dengan pendidikan tinggi, seperti lulusan S1 (12,3%) dan pascasarjana (0,7%), tercatat lebih sedikit. Data ini menggambarkan bahwa pemilih di Padang Panjang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah, yang berpotensi memengaruhi preferensi dan keputusan politik mereka.

Dalam hal pekerjaan, sebagian besar pemilih bekerja sebagai wiraswasta/pedagang atau usaha sendiri (26,6%), diikuti oleh ibu rumah tangga (26,7%) dan sektor usaha kuliner (7%). Kategori lainnya seperti pekerja kantor perusahaan (1,8%) dan pegawai negeri sipil (PNS) (2,7%) menunjukkan proporsi yang lebih kecil. Data ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi pemilih yang dominan berasal dari sektor informal dan sektor rumah tangga, yang mungkin lebih rentan terhadap iming-iming politik uang dalam konteks Pilkada.

Kepribadian Pemimpin yang Diinginkan Masyarakat

Hasil survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan calon kepala daerah yang memiliki karakter moral dan integritas yang tinggi. Data survei menunjukkan preferensi mayoritas terhadap calon yang memiliki karakter jujur dan anti korupsi (35,3%), yang mencerminkan harapan masyarakat agar pemimpin dapat menjaga akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, 29,1% responden menginginkan calon yang taat beragama atau beribadah, mengindikasikan bahwa masyarakat berharap pemimpin mereka dapat memberikan contoh moral yang baik, terutama dalam kehidupan sosial dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai agama.

Karakter ramah dan santun juga dianggap penting oleh 12,3% responden, yang menginginkan pemimpin yang mampu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan menjaga hubungan sosial. Ini mencerminkan harapan akan pemimpin yang tidak hanya efektif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki sikap yang menghormati masyarakat.

Adapun keinginan masyarakat terhadap pemimpin yang adil kepada semua kelompok (7,1%) dan tegas dalam mengambil tindakan (11,5%), meskipun lebih rendah, tetap menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu menjaga keadilan sosial dan berani mengambil keputusan tegas dalam situasi sulit dianggap sangat diperlukan.

Tabel 1. Preferensi Kepribadian Kandidat

Karakter yang Diinginkan	Persentase (%)
Jujur dan Anti Korupsi	35,3
Taat Beragama atau Beribadah	29,1
Ramah dan Santun	12,3
Adil kepada Semua Kelompok	7,1
Tegas dan Berani dalam Mengambil Tindakan	11,5
Mengerti Adat Budaya	1,6

Perilaku Politik Uang

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat terhadap karakter pemimpin dan perilaku politik uang yang mereka lakukan dalam memilih calon kepala daerah. Sebanyak 53,3% responden mengakui bahwa pemberian uang atau sembako memengaruhi pilihan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menginginkan pemimpin dengan karakter yang baik, politik uang masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keputusan pemilihan.

Data juga menunjukkan bahwa 39,9% responden merasa bahwa politik uang tidak akan memengaruhi pilihan mereka, sementara 26,6% responden memilih berdasarkan jumlah imbalan materi yang diberikan oleh calon pemimpin. Ini menggambarkan bahwa sejumlah pemilih cenderung menilai besarnya imbalan materi sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan mereka, walaupun mereka menginginkan karakter pemimpin yang lebih tinggi seperti kejujuran dan integritas.

Tabel 2. Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Memilih

Pengaruh Politik Uang	Persentase (%)
Ya, Akan Mempengaruhi	11,9
Bisa Ya, Bisa Tidak	14,7
Tidak Akan Mempengaruhi	39,9
Tergantung Jumlahnya	26,6
Tidak Tahu	5,3
Tidak Menjawab	1,6

Pembahasan

Ketidaksesuaian antara Preferensi Karakter Pemimpin dan Politik Uang: Analisis Teoritis

Fenomena ketidaksesuaian antara preferensi karakter calon pemimpin yang diinginkan masyarakat dan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh politik uang dapat dianalisis lebih dalam menggunakan teori perilaku memilih dan pilihan rasional. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, meskipun mayoritas responden di Padang Panjang menginginkan pemimpin yang jujur, anti-korupsi, dan religius, lebih dari setengah responden mengaku bahwa politik uang memengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketegangan antara nilai moral ideal dan perilaku nyata pemilih dalam memilih, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis terkait keuntungan material yang lebih langsung terasa.

Teori pilihan rasional, yang pertama kali dikembangkan oleh (Downs, 1957), memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami fenomena ini. Menurut teori ini, individu akan membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai opsi yang ada. Dalam konteks pemilihan politik, pilihan rasional mengarah pada keputusan untuk memilih kandidat yang menawarkan manfaat material langsung, meskipun tidak sesuai dengan preferensi moral ideal. Raub (2021) lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan di mana hasil dari pilihan politik tidak jelas, pemilih akan cenderung memilih opsi yang memberi mereka manfaat langsung yang lebih terjamin. Hal ini sangat relevan dengan fenomena politik uang, di mana uang atau sembako yang diberikan oleh calon pemimpin dianggap sebagai keuntungan yang dapat segera dirasakan, meskipun calon tersebut mungkin tidak memenuhi kriteria moral yang diinginkan masyarakat (Herman, 2022; Padilah & Irwansyah, 2023).

Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan institusi pemerintahan juga berperan dalam menjelaskan kecenderungan memilih berdasarkan politik uang. Cagé (2020) mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan terhadap politik atau pemimpin mereka, pemilih cenderung memanfaatkan kesempatan pemilu untuk memenuhi kebutuhan material mereka melalui pemberian uang atau sembako. Ketidakpercayaan ini memperburuk kondisi demokrasi, di mana pemilih merasa bahwa politik uang adalah jalan yang lebih dapat diandalkan untuk memperoleh manfaat langsung, sementara janji-janji perubahan jangka panjang dari calon pemimpin dianggap tidak pasti atau tidak dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini, sebagian besar responden yang terlibat dalam survei menyatakan bahwa pemberian uang atau sembako

oleh calon kepala daerah lebih mempengaruhi keputusan mereka daripada pertimbangan karakter calon, hal ini mencerminkan kondisi ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan ketidakpastian yang dialami pemilih.

Penting untuk dicatat bahwa teori pilihan rasional tidak hanya menjelaskan perilaku pemilih dalam konteks politik uang, tetapi juga memperlihatkan ketergantungan pemilih pada strategi yang menawarkan keuntungan yang dapat langsung dirasakan, terutama dalam situasi sosial-ekonomi yang sulit. Dalam hal ini, politik uang berfungsi sebagai alat untuk "menyelesaikan masalah" atau memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, meskipun keputusan ini tidak mencerminkan pilihan berbasis nilai moral. Sebagaimana diungkapkan oleh Hicken (2011), praktik politik uang sering dipandang sebagai strategi pragmatis oleh pemilih, yang memahami bahwa meskipun politik uang bukanlah pilihan yang ideal, namun ia dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih pasti dibandingkan dengan janji-janji politik yang sulit direalisasikan.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara nilai ideal masyarakat terhadap karakter calon pemimpin dan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh politik uang bukan hanya mencerminkan dilema moral, tetapi juga mencerminkan kondisi ketidakpastian sosial dan ekonomi serta ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Hal ini berimplikasi pada kualitas demokrasi yang terdistorsi, karena politik uang dapat merusak mekanisme pemilihan yang seharusnya berbasis pada penilaian rasional terhadap kapabilitas dan integritas calon pemimpin. Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik yang lebih mendalam untuk mengurangi ketergantungan pada politik uang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Implikasi Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi

Ketidaksesuaian antara preferensi masyarakat terhadap karakter calon pemimpin dan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh politik uang menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam hal integritas pemilu dan akuntabilitas pemimpin terpilih. Politik uang, yang menggantikan penilaian berbasis kapasitas dan integritas dengan transaksi material, secara langsung merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan dan keadilan dalam memilih. Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi pemilih untuk memilih berdasarkan kriteria yang jelas dan rasional, seperti kapabilitas calon pemimpin dan visi mereka untuk masa depan, bukan berdasarkan tawaran uang atau barang yang bersifat sementara. Dalam hal ini, politik uang mengubah pemilu dari sarana pengambilan keputusan politik yang sah menjadi sebuah

transaksi ekonomi jangka pendek yang lebih mengutamakan keuntungan material daripada idealisme politik.

Politik uang dapat menurunkan kualitas pemilu secara keseluruhan, karena memilih berdasarkan imbalan material mengurangi perhatian pemilih terhadap isu-isu substansial yang seharusnya menjadi dasar pilihan mereka, seperti kebijakan, program, dan visi calon pemimpin. Sebagai akibatnya, pemilih lebih cenderung memilih calon yang memberi mereka keuntungan langsung, tanpa mempertimbangkan rekam jejak atau kapabilitas calon tersebut. Hal ini memperburuk standar substantif pemilu dan memperlemah prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan pemilihan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan calon dalam melayani kepentingan umum, bukan berdasarkan keuntungan pribadi.

Lebih jauh lagi, politik uang menciptakan dilema akuntabilitas bagi pemimpin terpilih. Mereka yang terpilih melalui praktik politik uang sering kali merasa berutang kepada mereka yang memberikan dukungan material, sehingga lebih fokus untuk memenuhi kepentingan para penyokong daripada melayani seluruh rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Cagé (2020), hal ini membentuk sebuah siklus ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang semakin menguat, karena pemilih merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dengan baik dalam jangka panjang. Ketergantungan pada politik uang ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan meningkatkan praktik korupsi, karena pemimpin terpilih lebih mengutamakan pembalasan ekonomi terhadap pendukung mereka daripada mengutamakan kepentingan publik secara keseluruhan. Pada akhirnya, kondisi ini merusak integritas dan efisiensi pemerintahan demokratis, sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses pemilu yang berlangsung.

Selain itu, politik uang juga berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Ketika praktik politik uang menjadi norma dalam pemilihan umum, calon pemimpin yang memperoleh dukungan melalui pemberian uang atau barang cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kepentingan sesaat daripada merancang kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Schaffer & Schedler (2007), politik uang menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperburuk ketidaksetaraan sosial, di mana pemilih yang lebih miskin atau kurang berpendidikan sering kali terjebak dalam transaksi jangka pendek yang mengabaikan kepentingan mereka dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga menghambat perkembangan demokrasi yang sehat, karena mengalihkan perhatian dari

kebijakan substantif menuju pembelian suara. Akibatnya, hal ini menurunkan efektivitas pemerintahan, memperburuk pengelolaan sumber daya, dan memperlemah kepercayaan publik terhadap keberlanjutan proses demokrasi.

Strategi Menghadapi Politik Uang: Pendidikan Politik dan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi dampak negatif dari politik uang terhadap kualitas demokrasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat jangka panjang dan sistemik. Salah satu langkah yang paling mendesak adalah pendidikan politik yang intensif bagi masyarakat (Aars & Christensen, 2020). Pendidikan ini harus menekankan pentingnya memilih berdasarkan karakter, kapabilitas, dan rekam jejak calon pemimpin, bukan berdasarkan tawaran materi yang bersifat sementara (Fernandes et al., 2023). Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan daerah melalui pemilihan yang lebih berbasis pada visi dan nilai-nilai moral, ketimbang pada praktik transaksional semata (Fernandes et al., 2022).

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang sangat penting. Hukum yang berlaku harus mampu memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku politik uang, termasuk calon pemimpin yang terlibat dalam praktik tersebut. Ini tidak hanya akan memberi efek jera, tetapi juga memperlihatkan komitmen negara terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan (Budiyono, 2013). Penegakan hukum yang konsisten akan membantu mengurangi ketergantungan pada politik uang dan mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang lebih substansial (Fahmi et al., 2020).

Penguatan institusi penyelenggara pemilu juga merupakan langkah yang tak kalah penting. Pemilu yang transparan, terorganisir dengan baik, dan diawasi secara ketat akan mengurangi peluang bagi politik uang untuk berkembang (Alfa & Fahmi, 2022). Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan di tingkat lapangan, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawas pemilu akan menciptakan iklim pemilu yang lebih bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai langkah tambahan, calon pemimpin juga perlu menciptakan program-program konkret yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Dalam banyak kasus, politik uang diterima oleh pemilih sebagai bentuk perhatian dari calon pemimpin, terutama di daerah dengan tradisi patronase yang kuat (Aspinall & Berenschot, 2019). Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk menawarkan solusi nyata atas permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, sehingga

masyarakat tidak merasa terjebak dalam praktik politik uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka.

Kesimpulan

Hasil analisis dari debat publik pemilihan kepala daerah Kota Padang 2024 mengungkapkan berbagai pendekatan strategis yang diusulkan untuk menjawab isu-isu utama kota. Visi, misi, dan program yang disampaikan oleh para kandidat mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan di bidang lingkungan, sosial-ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat implementasi, inovasi, dan kejelasan teknis dari masing-masing program yang diusulkan.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi seperti "Kota Pintar" menjadi salah satu solusi yang paling menonjol. Digitalisasi layanan publik, pemantauan emisi kendaraan secara real-time, dan sistem transportasi berbasis aplikasi menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi tata kelola lingkungan. Meski demikian, kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan program ini. Sementara itu, integrasi nilai-nilai adat dan agama dalam kebijakan lingkungan memberikan landasan moral yang kuat, tetapi memerlukan strategi teknis yang lebih terukur agar dapat memberikan dampak nyata.

Pada isu sosial-ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM menjadi fokus utama. Strategi ini berpotensi mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh pengawasan dan kebijakan berbasis bukti. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada pengelolaan yang transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.Tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal menunjukkan arah yang progresif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memastikan inklusivitas dalam penerapan teknologi.

Secara keseluruhan, debat publik ini menyoroti pentingnya integrasi antara teknologi, nilai-nilai lokal, dan inovasi strategis untuk menjawab tantangan Kota Padang. Pendekatan holistik yang menggabungkan elemen-elemen ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang relevan, aplikatif, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Aktaviana, N., Awalia, A., Holilah, N., Silviani, V., & Muslim, A. (2023). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Abdi Nusa*, *3*(2), 87–91. https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i2.61

Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *9*(1), 73–84. https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307

Arsani, A., Harmonis, El-Adawiyah, S., & Satispi, E. (2020). Retorika Politik Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Pada Debat Politik Pilkada DKI Jakarta 2017. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *3*(2), 75–91.

Besli, E., & Solosumantro, H. (2024). Proses, Makna dan Relevansi Upacara Pongo dalam Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Lempe, Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, *6*(1), 49–59. https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.73234

Fadhli, A., Ad, A., Fatima, J. M., & Mau, M. (2024). Kampanye Negatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020 (Analisis Isi Video Debat Publik Pilwali Tahun 2020). *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unhas (H-IKON)*, 1(1), 52-65.

Indrawan, J., Elfrita Barzah, R., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial. *Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 109–118. https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4519

Laksmi, P. A. & Arjawa, I. G. W. (2023). Kearifan Lokal dalam Mendukung Pengembangan Industri Kreatif di Provinsi Bali. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) 4*(1), 1–15. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp1-15

Ma'mun, A. R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16

Majid, N. (2023). Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum di Era Digital. *Perseptif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 53–61. https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34

Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mujaini, M., Setiati, W., & Pagawak, M. (2022). Sinergitas Antar Fasilitator, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Melalui Program Kampung Berseri Astra (KBA) Sebagai Upaya Pengembangan Kampung Enggros. *Accounting Profession Journal*, *4*(2), 63–69. https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.54

Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(2), 2306–2315.

Pramesti, A. A., & Mardhatillah, Y. (2023). Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, *5*(1), 62–86. https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i1.2851

Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 44–55. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22

Suharto, T., Prasetyo, B. D., & Wulandari, M. P. (2020). Analisis Wacana Kritis Komunikasi Verbal pada Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3*(2), 43–54.

Teti, A. (2023). Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Bupati Danwakil Bupati Paket SN-KT Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak2020 di Kabupaten Malaka. *Jurnal Poros Politik*, *5*(1), 24–32.

Rismanto, R. & Yulianita, N. (2024). Analisis Wacana Komunikasi Verbal Pada Debat Pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. *ArtComm*, 7(2), 256-266.

Z, J., Priadi, R., & Thariq, M. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, *7*(2), 453.